

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Tingkat Pengangguran dan Strategi Pemulihan Pasar Tenaga Kerja

Ariana Herawaty, Dwi Rahayu, Alea Naura Ramadhanty, Yahya Amiria Syifaa, Tianata Octia Pasha Hepieni, Muhammad Iqbal Fafallyanuri, Salfa Apriliane

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang

arnnaherawaty@students.unnes.ac.id, dwir57812@students.unnes.ac.id,

yahyavivo86@students.unnes.ac.id, iqbalrafa25@students.unnes.ac.id,

tianatapasha@students.unnes.ac.id,

aleanaura2005@students.unnes.ac.id, salfaapriliane25@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic significantly disrupted Indonesia labor market, causing the national unemployment rate to rise from 4,9% in early 2020 to 7,07% by August 2020. Although it declined to 6.49% in 2021, many workers shifted to informal and low-productivity jobs. This shift reflects deeper structural issues such as skill mismatches and high informality. This paper analyzes the pandemic's impact on unemployment and evaluates key recovery strategies. Based on data from BPS and recent studies. Government responses include the Pre-Employment Card program, aimed at vocational upskilling, and broader reforms like the Job Creation Law. While digital economy growth (e-commerce) offered new opportunities, challenges remain in improving digital skills and job quality. Overall, strengthening job training, promoting inclusive policy reform, and accelerating digital transformation are essential for sustainable labor market recovery in Indonesia.

Keywords: unemployment, COVID-19, labor market, informal work, job training, Pre-Employment Card, Indonesia

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan besar pada pasar tenaga kerja Indonesia, dengan tingkat pengangguran nasional naik dari 4,9% pada awal 2020 menjadi 7,07% pada Agustus 2020. Meskipun turun menjadi 6,49% pada 2021, banyak pekerja beralih ke pekerjaan informal yang berproduktivitas rendah. Perpindahan ini mencerminkan persoalan struktural seperti kesenjangan keterampilan dan tingginya tingkat informalitas. Tulisan ini menganalisis dampak pandemi terhadap pengangguran serta mengevaluasi strategi pemulihan utama. Berdasarkan data BPS dan studi terbaru. Respons pemerintah meliputi program Kartu Prakerja untuk pelatihan vokasi dan reformasi kebijakan melalui UU Cipta Kerja. Pertumbuhan ekonomi digital seperti *e-commerce* menawarkan peluang baru, namun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan keterampilan digital dan kualitas pekerjaan. Secara keseluruhan, penguatan pelatihan kerja, reformasi kebijakan yang inklusif, dan percepatan transformasi digital menjadi kunci pemulihan pasar tenaga kerja Indonesia yang berkelanjutan.

Kata Kunci: pengangguran, COVID-19, pasar tenaga kerja, pekerjaan informal, pelatihan kerja, Kartu Prakerja, Indonesia

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah menimbulkan krisis kesehatan sekaligus ekonomi yang berdampak luas pada berbagai sektor, terutama pasar tenaga kerja. Menurut laporan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) pada tahun 2021, pandemi ini menyebabkan penurunan signifikan dalam jam kerja global, yang setara dengan hilangnya sekitar 255 juta pekerjaan penuh waktu secara internasional (ILO, 2021). Dampak ini tidak hanya berupa peningkatan tingkat pengangguran, tetapi juga pergeseran tenaga kerja ke sektor informal dengan produktivitas rendah dan penghasilan yang tidak menentu. Situasi tersebut menjadi sinyal adanya masalah struktural yang mendalam pada pasar tenaga kerja global, termasuk ketidaksesuaian keterampilan dan tingginya tingkat informalitas pekerjaan.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari dampak tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran nasional melonjak dari 4,9% pada Februari 2020 menjadi 7,07% pada Agustus 2020, yang merupakan lonjakan terbesar dalam beberapa dekade terakhir (BPS, 2020). Kenaikan pengangguran ini sebagian besar disebabkan oleh perlambatan aktivitas ekonomi di sektor formal seperti manufaktur dan jasa yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penurunan konsumsi domestik. Sebagai akibatnya, banyak pekerja kehilangan pekerjaan tetap dan terpaksa beralih ke pekerjaan informal dan sektor pertanian yang umumnya memiliki upah lebih rendah dan perlindungan sosial yang minim. Pergeseran ini menggambarkan tantangan ganda yaitu tidak hanya kehilangan pekerjaan tetapi juga menurunnya kualitas lapangan kerja yang tersedia.

Masalah ketenagakerjaan yang muncul selama pandemi ini juga memperlihatkan kelemahan yang sudah ada sebelumnya dalam sistem pasar tenaga kerja Indonesia, khususnya terkait *mismatch* keterampilan antara tenaga kerja dan kebutuhan pasar serta tingginya proporsi pekerjaan informal yang sulit mendapatkan perlindungan dan pengembangan. Saptari (2021) menyatakan bahwa situasi ini menuntut upaya pemulihan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga strategis dengan memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan serta mendorong reformasi kebijakan ketenagakerjaan agar lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika perubahan ekonomi, terutama di era transformasi digital.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dampak pandemi terhadap tingkat pengangguran dan evaluasi terhadap berbagai strategi pemulihan yang telah dan sedang diterapkan menjadi sangat penting. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi pasar tenaga kerja Indonesia, serta menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna dalam memperkuat ketahanan dan keberlanjutan pasar tenaga kerja ke depan.

TINJAUAN LITELATUR

Tinjauan litelatur ini mengintegrasikan empat aliran utama teori pengangguran yaitu; klasik, Keynesian, struktural, dan friksional untuk menjelaskan dinamika pasar tenaga kerja selama pandemi COVID-19. Teori klasik memandang pengangguran sebagai kondisi sementara akibat fleksibilitas upah, sedangkan Keynesian menekankan pentingnya permintaan agregat dan peran aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter ekspansif. Sementara itu, teori struktural menyoroti *mismatch* keterampilan yang muncul ketika teknologi dan struktur industri berubah cepat, dan teori friksional mengakui adanya periode transisi normal saat pekerja berpindah pekerjaan, yang keduanya semakin relevan di masa krisis.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pendidikan, pelatihan, dan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan memitigasi pengangguran pasca pandemi. Menurut Becker (1964), investasi pada *human capital* meningkatkan *output* per tenaga kerja, dan data World Bank (2023) menunjukkan pelatihan digital dapat meningkatkan efisiensi operasional UMKM hingga 20%. Di Indonesia, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka melonjak dari 4,9% pada Februari 2020 menjadi 7,07% pada Agustus 2020, sebelum turun ke 6,26% pada Februari 2021 dan 6,49% pada Agustus 2021, dengan jutaan pekerja berpindah ke sektor informal atau menghadapi pengurangan jam kerja.

Berbagai strategi pemulihan pasar kerja telah diterapkan, mulai dari jangka pendek subsidi upah, bantuan sosial, dan program Kartu Prakerja, hingga jangka menengah dan panjang yang menitikberatkan pada digitalisasi, *reskilling/upskilling*, reformasi regulasi, dan penguatan jaminan sosial universal. World Bank (2023) melaporkan 60% peserta pelatihan kembali terserap pasar kerja dalam enam bulan, sedangkan ILO (2021) menekankan pentingnya perlindungan sosial menyeluruh bagi pekerja formal maupun informal. Dengan pendekatan multidimensi ini, diharapkan pasar tenaga kerja Indonesia dapat pulih lebih cepat dan berkelanjutan di era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan *paper* ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menguraikan secara mendalam bagaimana pandemi COVID-19 berdampak terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, sekaligus menjelaskan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memulihkan pasar tenaga kerja. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel secara kuantitatif, melainkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang komprehensif berdasarkan data yang sudah ada.

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan diterbitkan oleh lembaga-lembaga resmi. Sumber data utama dalam penelitian ini antara lain berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data pengangguran nasional, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

(Kemnaker RI) untuk informasi kebijakan ketenagakerjaan, serta laporan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Bank Dunia (World Bank) yang membahas dampak pandemi secara global. Selain itu, penulis juga menggunakan referensi dari jurnal ilmiah, artikel berita, serta publikasi akademik yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan membaca, memilah, dan menafsirkan data secara sistematis. Penulis membandingkan kondisi ketenagakerjaan sebelum, selama, dan sesudah pandemi, mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak, serta mengulas berbagai program atau kebijakan pemulihan yang telah diterapkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan makalah ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan pengangguran akibat pandemi dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanganinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Pengangguran dan Tenaga Kerja Indonesia (2019-2023)

<u>Tahun</u>	Bulan	% Pengangguran	% Tenaga Kerja	Jumlah Penganggur (ribu)	Jumlah Tenaga Kerja (ribu)
2019	Februari	4,98%	95,02%	6.898,80	131.692,59
2019	Agustus	5,23%	94,77%	7.104,42	128.755,27
2020	Februari	4,94%	95,06%	6.925,49	133.292,87
2020	Agustus	7,07%	92,93%	9.767,75	128.454,18
2021	Februari	6,26%	93,74%	8.746,01	131.064,31
2021	Agustus	6,49%	93,51%	9.102,05	131.050,52
2022	Februari	5,83%	94,17%	8.402,15	135.611,90
2022	Agustus	5,86%	94,14%	8.425,93	135.296,71
2023	Februari	5,45%	94,55%	7.989,28	138.632,51
2023	Agustus	5,32%	94,68%	7.855,08	139.852,40

Source: Badan Pusat Statistik (BPS)

Data dalam tabel menunjukkan dinamika tingkat pengangguran dan jumlah tenaga kerja di Indonesia dari bulan Februari 2019 sampai bulan Agustus 2023. Sebelum pandemi, kondisi pasar tenaga kerja relatif stabil, ditandai dengan tingkat pengangguran yang rendah, yaitu 4,98% pada Februari 2019 dan sedikit naik menjadi 5,23% di Agustus 2019. Namun, ketika pandemi COVID-19 mulai melanda pada awal 2020, terjadi lonjakan signifikan dalam angka pengangguran. Pada Agustus 2020, tingkat pengangguran mencapai puncaknya sebesar 7,07%, disertai dengan peningkatan jumlah penganggur menjadi 9,7 juta orang. Hal ini mencerminkan dampak besar pandemi terhadap sektor ketenagakerjaan akibat dari pembatasan aktivitas ekonomi.

Walaupun demikian, tren pemulihan mulai terlihat sejak tahun 2021, ditandai dengan adanya penurunan bertahap tingkat pengangguran hingga mencapai 5,32% pada Agustus 2023. Jumlah tenaga kerja juga terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 131 juta pada 2019 menjadi hampir 140 juta di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia mulai pulih, meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi. Pemulihan ini bisa jadi didorong oleh relaksasi kebijakan, digitalisasi, dan juga dukungan pemerintah melalui berbagai program pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan.

A. Dampak Pandemi terhadap Tingkat Pengangguran:

○ Dampak Pandemi Covid

Periode 2019 hingga 2023 merupakan fase penting dalam dinamika ketenagakerjaan Indonesia. Krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19, perlambatan ekonomi global, dan ketidakpastian geopolitik telah mempengaruhi struktur pasar tenaga kerja secara signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang semula tercatat 5,23% pada Agustus tahun 2019 melonjak drastis menjadi 7,07% pada 2020, sebelum secara bertahap menurun menjadi 5,32% pada 2023 (Badan Pusat Statistik). Meski penurunan ini menunjukkan arah pemulihan, struktur pengangguran dan kerentanannya menunjukkan persoalan yang lebih kompleks.

○ Permasalahan Saat Pandemi Covid

Menurut ILO, efek dari pandemi COVID-19 sangat terasa pada sektor ekonomi yang banyak bergantung pada interaksi sosial dan pergerakan. Permintaan global untuk industri tekstil menurun drastis yang mengakibatkan hilangnya banyak lapangan pekerjaan. Sektor perhotelan serta makanan dan minuman sangat terdampak oleh pembatasan sosial, yang menyebabkan penutupan bisnis dan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, terutama di lokasi wisata. Sektor perdagangan, transportasi, dan penyimpanan juga mengalami dampak negatif akibat penurunan daya beli dan gangguan dalam rantai pasokan yang memperburuk situasi pekerja informal. Kelompok yang paling terdampak adalah kelompok muda (15–24 tahun), pekerja informal, dan perempuan. Pandemi ini menyoroti pentingnya perlunya reformasi di bidang ketenagakerjaan dan peningkatan jaminan sosial yang bersifat inklusif dan responsif untuk memastikan kelangsungan hidup pekerja serta menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional

B. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemulihan Tenaga Kerja:

○ Program Kartu Prakerja

Adanya pandemi covid-19 menimbulkan masalah besar dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Untuk mengurangi angka peningkatan pengangguran pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja yang menjadi kebijakan adaptif yang menggabungkan bantuan sosial dengan pelatihan keterampilan

berbasis digital. Program ini dirancang guna membantu pencari kerja, pekerja terdampak pandemi, dan pelaku usaha mikro supaya dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka melalui pelatihan daring. Dalam konteks krisis, format digital dinilai efektif karena memungkinkan partisipasi tanpa harus hadir secara fisik, sesuai dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan.

Namun, program ini sempat menuai kritik dalam efektivitasnya. Dimana peluncuran Kartu Prakerja dinilai kurang tepat waktu karena pelaksanaannya memakan waktu cukup lama dan tidak langsung menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan cepat dan konkret selama masa krisis. Dalam situasi ketika banyak rumah tangga kehilangan pendapatan secara tiba-tiba, bantuan tunai langsung dinilai lebih relevan ketimbang pelatihan yang efeknya baru terasa dalam jangka menengah.

Menurut Consuello (2020), program Kartu Prakerja menunjukkan ketidakmampuan negara menciptakan lapangan kerja, karena memberikan pelatihan dan insentif di tengah minimnya peluang kerja dan tingginya jumlah pencari kerja. Kritik ini menyoroti bahwa pelatihan tanpa jaminan tindak lanjut berupa peluang kerja konkret justru malah menambah frustrasi di kalangan penganggur. Serta adanya ketimpangan akses internet di daerah 3T dan juga variasi kualitas pelatihan dari berbagai penyedia turut menghambat efektivitas program ini.

○ **Bantuan Subsidi Upah (BSU)**

Program ini diberikan oleh Kemendikbud sebagai upaya perlindungan ekonomi bagi tenaga kependidikan non-PNS selama pandemi COVID-19. Tujuan utamanya yakni menjaga ketahanan ekonomi dan juga mendukung kelangsungan pembelajaran jarak jauh (WFH). BSU juga diharapkan dapat mencegah penyebaran virus Corona dengan memungkinkan para tenaga kependidikan tetap fokus bekerja dari rumah tanpa tekanan finansial tambahan. Data penerima BSU dihimpun dari Dapodik dan PDDikti oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), dengan validasi berlapis oleh institusi pendidikan dan dinas terkait supaya penyaluran tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan pemerintah lain.

Tetapi, walau skema non-tunai dipilih agar tidak menimbulkan kerumunan dan menghindari penyalahgunaan bantuan, realitanya justru menunjukkan bahwa proses pembukaan rekening baru justru memunculkan antrean panjang di bank penyalur. Hal ini berpotensi menciptakan kerumunan yang kontraproduktif terhadap tujuan pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, banyak bank penyalur yang juga menangani berbagai program bantuan lainnya, menambah beban layanan dan meningkatkan risiko penyebaran virus. Oleh karena itu, studi ini menyarankan agar

kebijakan ke depan mempertimbangkan penggunaan rekening bank eksisting atau metode distribusi yang lebih efisien.

- **Pelatihan *Digital Marketing***

Selama masa pandemi COVID-19, pelatihan *digital marketing* bisa berpengaruh penting dalam memberdayakan sumber daya manusia (SDM) UMKM. Pelatihan ini membantu pelaku usaha kecil menyesuaikan diri dengan perubahan drastis perilaku konsumen yang beralih ke platform digital. Melalui pelatihan, pelaku UMKM dibekali keterampilan baru dalam memasarkan produk secara daring, memanfaatkan media sosial, dan memahami cara kerja *marketplace online*. Hal ini tak hanya memperluas jangkauan pasar tetapi juga membangun kepercayaan diri pelaku usaha untuk bersaing dalam ekosistem digital yang semakin berkembang.

Adanya pelatihan digital juga memberikan dampak pada peningkatan kreativitas, kolaborasi, serta efisiensi operasional UMKM. Pemberdayaan ini memungkinkan pelaku usaha yang sebelumnya mengandalkan pemasaran konvensional untuk tetap bertahan, bahkan tumbuh, di tengah keterbatasan aktivitas fisik. Dengan dukungan pelatihan yang tepat, SDM UMKM dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi sebagai alat strategis dalam mengembangkan usaha di masa krisis maupun pasca-pandemi.

- **Pemberdayaan UMKM**

UMKM berperan penting di dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor informal dan wilayah pedesaan, sehingga bisa menjadi solusi strategis untuk mengurangi tingkat pengangguran, terutama pasca pandemi. Selain dukungan akses ke modal, pasar, dan pelatihan keterampilan, pemerintah juga perlu mendorong digitalisasi UMKM agar mampu bersaing di era ekonomi digital. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM bisa memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga menciptakan peluang usaha baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia. Lonjakan tingkat pengangguran, pergeseran signifikan ke sektor informal, serta penurunan kualitas pekerjaan menunjukkan kerentanan struktural dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Meskipun tren pemulihan mulai terlihat sejak tahun 2021, tantangan mendasar seperti *mismatch* keterampilan, tingginya tingkat informalitas, serta ketimpangan akses terhadap pelatihan dan peluang kerja masih menjadi hambatan utama. Berbagai kebijakan seperti Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Upah (BSU), pelatihan digital, dan program pemberdayaan UMKM telah diimplementasikan sebagai bagian dari strategi pemulihan. Namun, efektivitas

kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pemulihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, maka disarankan beberapa langkah strategis berikut:

1. **Melakukan reformasi strategis pada program-program ketenagakerjaan**, dengan menekankan pada penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi produktif, bukan hanya pelatihan semata.
2. **Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Kartu Prakerja**, karena meskipun bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, implementasinya dinilai kurang efektif dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat selama krisis. Pelatihan yang disediakan tidak selalu relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan akses internet di daerah tertinggal masih menjadi kendala utama.
3. **Merevisi skema penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)**. Penyaluran bantuan secara non-tunai melalui pembukaan rekening baru justru menimbulkan antrean panjang di bank dan berpotensi menciptakan kerumunan. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal program, yakni untuk mengurangi mobilitas dan risiko penularan. Oleh karena itu, metode penyaluran bantuan perlu memanfaatkan rekening eksisting atau mekanisme distribusi digital yang lebih efisien dan terintegrasi.
4. **Meningkatkan efektivitas pelatihan digital dan pemberdayaan UMKM**, tidak hanya berhenti pada penyediaan pelatihan, tetapi juga disertai dengan pendampingan, *monitoring*, dan penguatan akses pasar. Evaluasi dampak pelatihan terhadap omzet, pertumbuhan usaha, dan keberlanjutan perlu menjadi indikator utama.
5. **Memperkuat koordinasi antar-lembaga pemerintah** (Kemenaker, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia), agar kebijakan ketenagakerjaan, fiskal, dan moneter berjalan selaras, efektif, serta saling melengkapi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
6. **Fokus jangka panjang perlu diarahkan pada penguatan kualitas SDM**, khususnya bagi generasi muda dan kelompok pekerja informal, agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi digital dan meningkatkan daya saing nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, L. H. A., & Amri, W. A. A. (2021). Ekplorasi Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tenaga Kependidikan Non PNS Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(1), 181-188.
- Badan Pusat Statistik. (2020, Mei 5). *Februari 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99 persen*.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka-tpt--sebesar-4-99-persen.html>.

Badan Pusat Statistik. (2020, November 5). *[Revisi per 18/02/2021] Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/11/05/1673/-revisi-per-18-02-2021--agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

Badan Pusat Statistik. (2021, November 5). *[Revisi per 09/11/2021] Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/11/05/1816/-revisi-per-09-11-2021--agustus-2021-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>

Ginting, M. L. B., & Herdiyana, R. (2020). Peran pemerintah pada kebijakan kartu prakerja dalam memulihkan kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Analis Kebijakan*, 4(2), 1-15.

Hidayat, A. R., Alifah, N., & Rodiansjah, A. A. (2023). Kontribusi Digitalisasi Bisnis Dalam Menyokong Pemulihan Ekonomi dan Mengurangi Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Syntax Idea*, 5(9), 1259-1269.

Marjukah, A. (2022). Pengaruh Pelatihan Pemasaran Digital Terhadap Kinerja UMKM di Masa Pandemi Covid. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 20(1), 1-12.